

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN *CYBER*  
MELALUI SARANA HUKUM PIDANA  
(Sebuah Catatan untuk RUU tentang Teknologi Informasi Draft Ketiga) <sup>1</sup>**

Oleh: M. Arief Amrullah <sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Jember  
Jl. Kalimantan No. 37 Telp. (0331) 335462 Fax. 330482 Jember

**Abstracts**

Trading transaction by internet has played an important role in international trading and influenced economics and balance of payments of a certain state. However, beside all of excess and benefit from internet, using the global network is potential to make the new form of crime that is cybercrime, emerge.

To fight the new form of crime it is necessary for Indonesia to make a statute that is able to prevent computer-base crime use. Now Indonesia has prepared the Draft of Information Technology.

One of the efforts to cope with the new form of crime (computer-related crime) are by using penal instrument as written in Chapter XI Articles 29 to 39 of Statute Draft. But the penal policy is still not as it is wished as written in Consideration or in General Explanation of Statute Draft. Hence, before the draft has not been enacted, it needs to be revised, so the existence of the statute will be very usefull for the importance of nations and state.

Key Words: Penal policy, cybercrime.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perpaduan teknologi informasi, elektronika, komputer, dan telekomunikasi, memungkinkan terbentuknya jaringan telekomunikasi global yang mampu membuat terhubungnya jaringan komputer secara bersamaan di seluruh dunia. Jaringan global itu terbuka bagi semua orang, sehingga setiap orang bebas mengakses jaringan tersebut untuk berkomunikasi dan melakukan berbagai kegiatan di dunia maya. Transaksi perdagangan melalui jaringan internet, telah memainkan peran yang penting dalam perdagangan internasional dan

---

<sup>1</sup> Draft ini disusun oleh Pusat Kajian Cyberlaw Universitas Padjadjaran.

<sup>2</sup> Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember